**IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI**

**SENZA NESANDRA S.AP1**

**M.DHANY ALSUNAH,S.Pd.,M.Pd2, FADLAN KALMA,S.Thi,M.H3**

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email :

[Senzanesandra85@gmail.com](mailto:Senzanesandra85@gmail.com)

[Dhanyalsunah@gmail.com](mailto:Dhanyalsunah@gmail.com)

[Fadlankalma@gmail.com](mailto:Fadlankalma@gmail.com)

*ABSTRACT*

*This study aims to determine and explain the Implementation of the Distribution of Non-Cash Food Assistance in the District of Siulak, Kerinci Regency. This study uses a qualitative method with the type of descriptive research with a qualitative approach. The technique of determining the informants in this study is the Purposive samplingtechnique. Data collection techniques used were interviews. This research uses data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that: (1) The implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in Siulak District has run well as expected, this is due to the success indicators of BPNT namely the exact amount, price, quality, target, and time that have been fully achieved, although not yet optimal. (2) The factors that influence the process of implementing the BPNT Program are 2 namely inhibiting factors and factors supporters.*

*Keywords: Implementation, Distribution, BPNT*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci .Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi.Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik *snowball sampling.* Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah wawancara,observasi,dan studi dokumentasi .Penelitian ini Menggunakan Teknik Analisis data berupa Reduksi Data,Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan .Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Ketepatan sasaran mengenai penyaluran bantuan Program BPNT sudah tepat sasaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, (2) Ketepatan waktu penyaluran bantuan Program BPNT belum sepenuhnya tepat waktu,(3)Tingkat Pendapatan, dengan adanya pelaksanaan Program BPNT dan penerimaan bantuan berupa beras dan telur, dapat dikatakan tidak berpengaruh dalam tingkat pendapatan melainkan dengan adanya pelaksanaan Program BPNT mampu mengatasi dan membantu beban pengeluaran masyarakat,(4) Ketahanan Pangan, dengan adanya pelaksanaan dan penyaluran Program BPNT kepada masyarakat dapat dikatakan berjalan dengan efektif.

Kata Kunci : Implementasi,Distribusi,BPNT

**I. PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh beberapa negara-negara di dunia, khususnya di Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu keadaan/kondisi ketidakmampuan individu/kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada September tahun 2018 penduduk miskin Indonesia berjumlah 25,95 juta jiwa dan Maret tahun 2019 berjumlah 25,14 juta jiwa Penduduk Miskin di Indonesia.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak- anak yang terlantar dipelihara oleh negara” serta dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Untuk mengimplementasikan pasal 34 ayat 2 UUD 1945, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan mengeluarkan program-program sosial. Peran dari pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Program-program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai Oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dari diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut, maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat, yang keaggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada saat ini, telah banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan bank himpunan bank Negara (Himbara).

Bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan bantuan dari program pemerintah yang diberikan kepada warga miskin di Indonesia yang sudah data masuk ke dalam program keluarga harapan (PKH) atau keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme kartu elektronik atau akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan pangan masyarakat di E-Warong (elektronik warong) atau pedagang bahan pangan yang terdaftar memenuhi persyaratan dan bekerjasama dengan Bank Negara seperti Bank BRI, BTN, dan lain sebagainya. Namun penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) tidak hanya peserta program keluarga harapan (PKH) saja. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannnya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik. Dengan adanya KKS, peserta keluarga penerima manfaat (KPM) dapat membeli kebutuhan bahan pangan seperti (beras, gula, tepung, minyak goreng dan lain- lain), melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi tertentu. Di dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik terdapat sistem *Saving account* dan *e-Wallet*/dompet elektronik, sehingga peserta keluarga penerima manfaat (KPM) dapat membelanjakan dana bantuan sosial untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Apabila dana bantuan tersebut masih tersisa dan tidak habis dalam jangka waktu 1 bulan, maka dana tersebut akan secara otomatis tersimpan di tabungan serta dapat digunakan kembali pada bulan berikutnya.

Tujuan program bantuan pangan non tunai (BPNT) salah satunya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Hal ini telah diatur pada PERMENSOS No.10 Tahun 2017 tentang Program keluarga harapan (PKH) dan PERPRESRI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, serta PERMENSOS No.25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Usaha Melalui Eletronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT), maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan PERPRES RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Presiden sangat mengapresiasi program BPNT, karena mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta keluarga penerima manfaat (KPM), meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan.

Pada awalnya, program bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera (Rastra) yang memiliki beberapa permasalahan. (Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2017) menjelaskan bahwa pergantian program Rastra menjadi BPNT, dikarenakan dalam pelaksanaan program Rastra terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks yaitu : Pertama, dapat dilihat dari indikator tepat sasaran, yang dimana masih ditemukan *Exclusion Error* dan *Inclusion Error* yang tinggi. *Exclusion error* misalnya, masih terdapat rumahtangga yang seharusnya menerima Rastra, akan tetapi tidak terdaftar menjadi penerima Rastra, sehingga masyarakat tidak mendapat bantuan sosial Rastra tersebut. Sementara, *Inclusion Error* sebaliknya, yaitu terdapat rumah tangga yang tidak berhak untuk menerima Rastra, justru menerima bantuan tersebut.

Kedua, indikator tepat jumlah. Masih banyak terdapat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang hanya menerima 4-6 kg per-bulan dari yang seharusnya sebanyak 15 kg per-bulan. Selain itu, RTS-PM juga harus membayar bahan pangan (terutama beras) lebih mahal dari yang seharusnya, yaitu Rp 1.600 per-kg. Ketiga, untuk indikator tepat waktu masih sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian bahan pangan, yang dimana pendistribusian tersebut seharusnya dilakukan setiap bulan. Melihat dari permasalahan-permasalahan dari program Rastra tersebut, maka pada tahun 2016 hingga 2017, pemerintah mulai melakukan perubahan terkait skema program Rastra, menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai.

Adanya progam pemerintah tersebut ditujukan sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu agar dapat mewujudkan keluarga sejahtera. Sehingga diharapkan pelaksanaan Penyaluran bantuan pangan non tunai dapat berjalan dengan baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam Pelaksanaannya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus mengacu pada Indikator Keberhasilan tersebut , yakni BPNT yang Pertama , harus tepat Sasaran , maksudnya adalah penerima BPNT harus benar-benar yang layak untuk mendapatkan program tersebur.Kedua tepat Waktu ,yaitu pendistribusian haruslah tepat waktu.

Pelaksanaan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) masih terdapat banyak kendala,masalah tersebut diantaranya ketidaktepatan penerima dan Ketidaktepatan waktu . Masalah Ketidaktepatan penerima dan ketidaktepatan waktu juga terjadi di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci, Berdasarkan Penelitian Sementara bahwa Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang seharusnya dibagikan kepada warga atau golongan menengah kebawah yang kurang mampu namun realitanya masih banyak warga yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan tersebut namun dalam pembagiannya tidak mendapat apa yang harus menjadi hak nya.

Dari hasil pengamatan sementara juga didapat bahwa permasalahan penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci yang tidak efektif,Hal tersebut terlihat dari fenomena yaitu pembagian Bantuan Pangan Non Tunai yang tidak tepat sasaran masih adanya masyarakat yang sudah mampu masih menerima bantuan sebaliknya masih terdapat sebagian masyarakat yang layak untuk menerima bantuan tetapi tidak menerima bantuan tersebut dan tidak tepat waktu di mana sering terjadinya keterlambatan dalam penyaluran BPNT.

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan dapat dikatakan terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan, yaitu belum optimalnya implementasi distribusi Bantuan Pangan Non Tunai yang disebabkan oleh beberapa faktor tersebut diatas, sehingga secara umum keberhasilan BPNT masih belum sesuai dengan tujuan dan sasaran ditetapkannya kebijakan program BPNT oleh pemerintah.

**II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini lebih menggambarkan pada deskripsi data dari pelaksanaan program yang dijadikan penelitian. Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian fenomenologi.

Iskandar (2010: 204), Penelitian fenomenologi berorientasi untuk memahami, menggali dan menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu. Ini biasa disebut dengan penelitian kualitatif dengan menggunakan pengamatan terhadap fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial yang alamiah *(nature),* digunakan sumber data, pendekatan ini berdasarkan kenyataan lapangan *(empiris).* Berdasarkan hal tersebut, metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang program yang diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana Implementasi Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci.

1. **Penentuan Informan**

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini *snowball sampling.* Alasan penggunaan Teknik ini adalah dimana pada situasi tertentu,jumlah subjek penelitian yang terlibat menjadi bertambah karena subjek atau informan sebelum nya kurang memberikan informasi yang mendalam atau pada situasi tertentu tidak memungkinkan peneliti untuk mendapat akses pada sumber,lokasi atau subyek yang hendak diteliti. Adapun informan pada penelitian ini Meliputi Kriteria sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin Di Dinas Sosial Kabupaten Kerinci .
2. Koordinator Kesejahteraan Sosial yang Bisa memberikan informasi Lengkap dan Mendalam sesuai Kebutuhan Peneliti .
3. TKSK Kecamatan Siulak sebagai pendamping Penyaluran BPNT.
4. Masyarakat penerima Bantuan BPNT yang bisa memberikan Info Lengkap dan akurat.
5. Bersedia Menjadi Informan.
6. **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Menurut Cholid Narbuko (2003 : 83) metode *interview* (wawancara) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi–informasi atau keterangan keterangan. Metode ini diharapkan akan memperoleh data primer yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat menjadi gambaran yang lebih jelas guna mempermudah menganalisis data selanjutnya. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hal-hal umum apa yang diketahui tentang program BPNT baik tentang sasaran, tepat, waktu,. Hal-hal lain yang diperoleh dari wawancara ini berupa pandangan-pandangan umum dan pengetahuan para informan tentang BPNT.

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2013 : 203) Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang penting adalah proses–proses pengamatan dan ingatan. Nasution (dalam Sugiyono, 2013 : 310) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Alasan menggunakan teknik observasi dalam penelitian ini agar bisa mengamati kondisi masyarakat sekitar sehingga bisa memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan pelaksanaan penyaluran BPNT dengan mengamati secara umum kegiatan sehari-hari di masyarakat dan kondisi lingkungan.

1. Studi dokumentasi

Menurut Iskandar (2010: 219) teknik ini merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumen yang dimaksud diantaranya adalah dokumen pribadi, dokumen resmi, refrensi-refrensi, foto-foto, dan rekaman kaset. Dalam penelitian ini mengunakan dokumen yaitu buku, artikel atau surat kabar yang memuat tentang pelaksanaan BPNT, skripsi yang memuat tentang implementasi penyaluran BPNT, jurnal melalui internet yang memuat tentang BPNT, foto-foto yang digunakan untuk mengambil gambar informan dan rekaman suara melalui *handphone* saat melakukan wawancara.

1. **Teknik Analisis Data**

Analis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013 : 337) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai jenuh. Teknik analisis data ini meliputi tiga komponen analisis yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari data–data tertulis dilapangan. Selain itu, reduksi data merupakan suatu bentuk analisi yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi, cara yang dipakai dalam reduksi data dapat melalui seleksi yang panjang, melalui ringkasan atau singkatan menggolongkan kedalam suatu pola yang lebih luas. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemilihan data yang diperoleh pada saat penelitian mengenai permasalahan pelaksanan penyaluran BPNT yang tidak mengacu pada indikator Keberhasilan penyaluran BPNT, kemudian data tersebut diklasifikasikan dan dipilih secara sederhana.

1. Penyajian Data (Display)

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan menganalisi. Penyajian data lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data.Penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat ,grafik,bagan.ataupun kurva. Adapun data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah: Implementasi Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci.

1. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data).

Mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfgurasi-konfigurasi, dan alur sebab akibat dan proposi. Kesimpulan– kesimpulan senantiasa diuji kebenarannya, kekompakanya, dan kecocokan, yang merupakan validitasnya sehingga akan memperoleh kesimpualan yang jelas kebenaranya. Pada tahap ini, peneliti menarik simpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan penulis pada saat penelitian. Data yang akan diuji kebenarannya adalah permasalahan implemantasi distribusi BPNT yang tidak mengacu pada indikator Keberhasilan pelaksanaan penyaluran BPNT.

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berfokuskan kepada aspek pangan bagi masyarakat yang termasuk kedalam kategori miskin. Pelaksanaan Program BPNT tersebut sudah berjalan dari tahun 2017, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan. Dengan dilaksanakan nya program tersebut, Pemerintah sangat menginginkan adanya penurunan angka kemiskinan, mampu memberikan perlindungan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Tujuan utama dari Program Bantuan Pangan Non Tunai yaitu mengurangi beban pengeluaran, memberikan gizi yang lebih seimbang, meningkatkan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan Penyaluran program agar tercapainya tujuan program yakni memberikan kesejahteraan kepada masyarakat miskin, maka dibutuhkan dengan adanya ketepatan sasaran dan ketepatan waktu sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat program BPNT dalam aspek kesejahteraan tingkat pendapatan dan ketahanan pangan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan Implementasi Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai sudah berjalan dengan baik tetapi belum optimal, hal ini didasari bahwa penyaluran Program BPNT masih terdapat keterlambatan dan masyarakat belum merasakan sepenuhnya manfaaat dari Program BPNT.

**1.Ketepatan Sasaran**

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa secara keseluruhan masyarakat Kecamatan sudah mengetahui yang berhak menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai. Masyarakat juga mengatakan bahwa yang berhak dan menjadi prioritas menerima Program BPNT ialah keluarga yang tergolong tidak mampu, keluarga yang berpenghasilan rendah, mempunyai tanggungan anak dan lansia, serta wanita-wanita yang memiliki status janda menurut hasil wawancara Bapak Redi Fitmar S.Sos menyatakan bahwa Penyaluran Program BPNT sudah tepat sasaran, hal ini didasari dengan adanya data yang terkumpul, Dinas Sosial Kabupaten Kerinci akan memberikan rekomendasi masyarakat yang layak untuk menerima bantuan bagi yang benar-benar kurang mampu sesuai dengan UU No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Dede Wiranata , Penyaluran Program BPNT sudah tepat sasaran, karena masyarakat yang menerima atau terdaftar sebagai KPM itu adalah masyarakat yang lulus dari verifikasi data mapun survey langsung. Masyarakat yang akan dijadikan prioritas penerima BPNT ini adalah pola kehidupan dibawah garis kemiskinan.

**2.Ketepatan Waktu**

Menurut hasil wawancara narasumber mengenai ketepatan waktu, masyarakat Kecamatan Siulak menyampaikan bahwa penyaluran bantuan BPNT berupa beras dan telur masih sering terjadi keterlambatan waktu. Hal ini disampaikan oleh Ibu Irmawati selaku penerima BPNT di Kecamatan Siulak bahwa penyaluran BPNT pernah mengalami keterlambatan, upaya masyarakat ialah dengan menyampaikan pengaduan kepada petugas pendamping agar bantuan yang terlambat untuk kedepan nya diberikan secara *double.*

Hasil wawancara dengan Bapak Redi Kabid di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Kerinci menyampaikan bahwa keterlambatan yang terjadi pada penyaluran BPNT dikarenakan adanya gangguan sistem pada pusat, maka saldo yang diberikan kepada KPM tidak masuk. Upaya yang bisa dilakukan ialah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan menyampaikan informasi di lapangan kepada mereka.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Dede Wiranata selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Siulak bahwa keterlambatan itu terjadi pada akhir tahun dan awal tahun. Untuk penyaluran di tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi keterlambatan, sudah menjadi hal yang biasa dikarenakan adanya rekapitulasi ulang mengenai anggaran tahun sebelumnya menuju anggaran tahun berikutnya.

**3.Tingkat Pendapatan**

Menurut hasil wawancara, narasumber masyarakat menyampaikan bahwa dengan adanya pelaksanaan Program BPNT tidak mempengaruhi tingkat pendapatan, hanya saja membantu dan mengatasi beban pengeluaran terkhusus untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Dengan menerima bantuan Program BPNT manajemen keuangan keluarga dapat terkelola dengan baik, karena perbedaan antara penghasilan dan pengeluaran, lebih banyak jumlah pengeluaran. Karena harga-harga kebutuhan sedang tidak stabil dan biaya pendidikan terjangkau mahal.

Berdasarkanwawancara dengan Bapak Redi Fitmar Kabid Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Kerinci menyampaikan bahwa tujuan utama dengan diselenggarakan nya program BPNT yakni mengharapkan agar beban pengeluaran masyarakat tetap terkendali, untuk mempertahankan kebutuhan sehari-hari dan membantu KPM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi keluarga.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak dede Wiranata selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Siulak beliau menyampaikan bahwa Program BPNT dapat mengatasi beban pengeluaran masyarakat, dapat mempengaruhi beban pengeluaran masyarakat, dan dapat mengurangi beban kehidupan masyarakat yang saat ini harga-harga kebutuhan dasar pangan seperti beras sedang terjadi ketidakstabilan.

**4. Ketahanan Pangan**

Hasil wawancara masyarakat menyampaikan bahwa dengan adanya Program BPNT belum membawa kesejahteraan secara maksimal, hanya saja kebutuhan pangan keluarga tetap stabil walau bertahan sampai dengan 10-14 hari, karena jumlah beras yang kami dapatkan per bulan sebesar 8kg-10kg dan telur sebanyak 10-20 butir per bulan. Berdasarkan pembahasan mengenai stabilitas gizi, bahwa BPNT sangat membantu dalam menjaga kestabilan gizi, karena hal yang di takutkan oleh masyarakat terhadap anak-anak nya yakni penyakit gizi buruk. Maka dengan menerima bantuan Program BPNT anak-anak kami tetap bergizi, bernutrisi dan mengenal hidup sehat. Masyarakat sangat berharap agar bantuan BPNT di pertambah lagi kuantitas berasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Redi Fitmar Selaku Kabid Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Kerinci menyampaikan bahwa pelaksanaan BPNT di Kecamatan Siulak saat ini sudah berhasil dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat dalam aspek ketahanan pangan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Dede Wiranata selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Siulak beliau menyampaikan bahwa program BPNT berhasil dan mengatasi permasalahan keluarga miskin, kalau membahas tingkat kesejahteraan nya tergantung kepada KPM dalam mengatur dan mengelola bantuan yang didapatkan.

**IV.KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang Implementasi Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran mengenai penyaluran bantuan Program BPNT sudah tepat sasaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini didasari bahwa yang menjadi prioritas penerima Program BPNT adalah keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan, berpenghasilan rendah, yang mempunyai tanggungan anak dan lansia, serta wanita-wanita yang memiliki status janda.
2. Ketepatan waktu penyaluran bantuan Program BPNT belum sepenuhnya tepat waktu. Hal ini didasari terjadinya keterlambatan penyaluran BPNT di akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020, disebabkan oleh beberapa faktor yakni sistem jaringan yang mengakibatkan saldo terlambat masuk ke rekening KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
3. Tingkat Pendapatan, dengan adanya pelaksanaan Program BPNT dan penerimaan bantuan berupa beras dan telur, dapat dikatakan tidak berpengaruh dalam tingkat pendapatan melainkan dengan adanya pelaksanaan Program BPNT mampu mengatasi dan membantu beban pengeluaran masyarakat.
4. Ketahanan Pangan, dengan adanya pelaksanaan dan penyaluran Program BPNT kepada masyarakat dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Sehingga masyarakat yang tidak mampu merasa terbantu, memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari dan pola gizi bagi tanggungan nya bisa dikatakan sejahtera.

**V.UCAPAN TERIMA KASIH**

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Yth, Bapak Murlinus,S.H,M.H selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti Sungai Penuh.
2. Yth, Bapak M.Dhany Alsunah,S.Pd,M,Pd Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Fadlan Kalma,S.Thi,M.H selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan Bimbingan dan arahan kepada penulis hingga tersusun nya skripsi ini.
3. Bapak/Dosen Civitas Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberikan pengetahuan,pengalaman,pengarahan selama penulis mengikuti pendidikan.
4. Kepada Ayahanda dan Ibunda,beserta Seluruh Keluarga Besar yang telah memberi doa restu,bantuan moral dan material,serta dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Kepada Sahabat-sahabatku rekan seperjuangan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti Sungai Penuh yang Selalu mendorong dan memberikan semangat dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun ini masih jauh dari kesempurnaan,karena itu penulis mengharapkan arahan dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tulisan ini di masa yang bakan dating.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan.

**VI.DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdulsyani, 2012. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan.*

Bumi Aksara:Jakarta.

Hartomo, H. dan Aziz A. 2004. *Ilmu Sosial Dasar*. Bumi Aksara : Jakarta.

Iskandar, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan* *Kualitatif).* Gaung Persada Press: Jakarta.

Nurbuko, Cholid. dkk. 2003. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara : Jakarta.

Moleong, J Lexy, . 2009. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Setiawan, G. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakarya Offset: Bandung.

Soekanto,S. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar.* PT.Raja Grafindo

Persada: Jakarta

Soelaeman, M. 1998. *Ilmu Sosial dasar.* Refika Aditama: Bandung

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Penelitian Pendidikan Pendekatan* *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta: Bandung

Suharto, E. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama: Bandung.

Syaukani, H.R. dkk. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan.* Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.* PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.